

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI JUMAT / 11 September 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

"Ini bukan tentang ide.
Ini tentang membuat ide
menjadi kenyataan."

Scott Belsky, co-founder of Behance

RESESI MAKIN PASTI, PULAU JAWA DIUSULKAN 'DIKUNCI'



SCAN ME

Kontribusi DKI Jakarta terhadap output perekonomian nasional sangatlah besar. Data BPS menunjukkan DKI Jakarta menyumbang 17,7% dari total output ekonomi Tanah Air. Walhasil saat Jakarta memutuskan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi mulai Senin, 14 September 2020, pasar saham hingga nilai tukar rupiah langsung tersungkur. Langkah 'penguncian' ibu kota inipun bisa dipastikan bakal membawa Indonesia masuk jurang resesi. Dari sisi ekonomi, menteri sampai politisi menuding miring kebijakan Gubernur Anies. Tapi menurut ahli epidemiologi kebijakan itu tepat dan harusnya seluruh wilayah di Jawa bersiap melakukan 'lockdown'. Apalagi hari ini rekor kembali dicetak dengan jumlah kasus baru positif Covid-19 hampir menyentuh 4.000 dalam sehari.

Baca Hal 11

PSBB Diberlakukan Kembali

Bekerja, belajar dan beribadah di rumah

Seluruh tempat kegiatan usaha non essential harus tutup dan melaksanakan mekanisme WFH secara penuh. Hanya ada 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan.



Seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian (terbatas pada komunikasi lokal dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat)



Seluruh tempat hiburan harus tutup



Seluruh usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang/diantar



Seluruh kegiatan public dan kegiatan kemasyarakatan harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan public



Transportasi public Kembali dibatasi dengan ketat dan jam operasionalnya. Ganjil genap untuk sementara ditiadakan

UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	207,203	147,510	8,456
Seluruh Dunia	27,871,271	18,780,806	903,756

Update : 10 September 2020 Pukul 15.27 PM

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

70 ZONA MERAH CORONA

(Per 9/9/2020)

Sumatera Utara	2. Pelalawan	2. Barito Timur	3. Kota Bekasi
1. Deli Serdang	3. Kota Dumai	3. Barito Selatan	
2. Kota Sibolga	4. Siak	4. Kota Palangkaraya	DKI Jakarta
3. Mandailing Natal	5. Kampar		1. Jakarta Pusat
4. Kota Gunungsitoli	6. Kuantan Singingi	Kalimantan Selatan	2. Jakarta Barat
5. Kota Binjai		1. Tanah Laut	3. Jakarta Timur
6. Kota Medan	Kepulauan Riau	2. Hulu Sungai Tengah	4. Jakarta Utara
	1. Kota Tanjungpinang	3. Balangan	Banten
Sumatera Selatan	2. Kota Batam	4. Kotabaru	1. Kota Tangerang
1. Lahat		5. Barito Kuala	2. Kota Tangerang Selatan
2. Muara Enim	Papua Barat	6. Hulu Sungai Utara	3. Tangerang
3. Kota Lubuklinggau	1. Teluk Bintuni		
	Maluku	Jawa Timur	Bali
Sumatera Barat	1. Kota Ambon	1. Banyuwangi	1. Badung
1. Kota Padang		2. Pasuruan	2. Gianyar
2. Kota Padang Panjang	Kalimantan Timur	3. Kota Malang	3. Bangli
3. Agam	1. Kutai Kartanegara	4. Probolinggo	4. Kota Denpasar
4. Kota Bukittinggi	2. Mahakam Ulu	5. Kota Pasuruan	5. Jembrana
	3. Kota Bontang	6. Sidoarjo	6. Karangasem
Sulawesi Utara	4. Kota Samarinda	Jawa Tengah	7. Buleleng
1. Kota Manado	5. Kota Balikpapan	1. Kota Semarang	8. Tabanan
2. Kota Makassar		2. Pati	
	Riau	Kalimantan Tengah	Aceh
	1. Kota Pekanbaru	1. Barito Utara	1. Aceh Jaya
			2. Kota Banda Aceh
			3. Aceh Barat
			4. Aceh Besar

SURABAYA WACANAKAN SWAB TEST GURU-SISWA JIKA KBM TATAP MUKA

Surabaya-Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus melakukan kajian terkait persiapan dibukanya sekolah tatap muka. Langkah finalisasi terkait SOP dan mengusulkan hasil tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Supomo mengatakan rencananya sebelum sekolah tatap muka kembali dibuka para guru dan murid semuanya harus dilakukan swab test.

"Jadi nanti kalau pembelajaran tatap muka, kita tidak ingin nanti seminggu buka, terus tutup lagi. Maka kami harus teliti dan hati-hati. Smuanya harus di swab termasuk guru dan murid. Saat ini kami sudah melakukan pendataan pada orang tua murid. Adakah murid yg mempunyai penyakit penyerta, bila dmeikian maka tidak bisa ikut pembelajaran tatap muka," katanya, Kamis (10/9).

Tak hanya para orangtua dan murid yang didata, para guru juga didata. Mulai dari guru-guru yang hamil atau memiliki penyakit penyerta. Kalau nantinya guru tersebut memilki penyakit penyerta maka untuk sementara tidak dapat mengajar secara tatap muka.

"Tapi tetap melakukan daring. Jadi bisa dikatakan sekolah tatap muka ini adalah salah satu alternatif pembelajaran daring. Pembelajaran daring tetap dilakukan begitu juga pembelajaran melalui televisi tetap dilakukan. Karena varian-varian yang nanti menjadi pilihan sehingga semua anak yang mempunyai kemampuan finansial atau tidak itu tetap bisa sekolah," jelasnya.

Lebih lanjut Supomo mengatakan pihaknya telah mencari program CSR untuk anak-anak tidak mampu. Sehingga tidak ada alasan untuk anak di Kota Surabaya tidak sekolah. "Karena pemerintah sudah berupaya mencari CSR juga. Kemarin kita alhamdulillah dapat Rp 4,3 miliar untuk membantu dari keluarga tidak mampu sehingga mereka nanti tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Saat ini pun kami mendatangi anak-anak yang belum sekolah kan kita punya daftarnya itu kita datang dari rumah ke rumah sehingga mereka kami daftar yang mereka mau," ujarnya.

Terkait kapan target pembukaan sekolah tatap muka kembali, Supomo

menegaskan tidak bisa ditarget sebab harus melihat zona di Surabaya. Ada SKB (Surat Keterangan Bebas) Empat menteri untuk memberikan petunjuk diperbolehkan atau tidak wilayah tersebut.

"Kajian kita sudah selesai ternyata zona di Surabaya berbeda, kita pun melakukan usulan. Harapan kami kemudian dari usulan itu dikaji oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat nanti responnya bagaimana mengikuti apa yang jadi petunjuk," pungkasnya.(ard)



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA, SUPOMO

5 Tips BETAH DI RUMAH



BERSIH-BERSIH RUMAH

- » Bersihkan debu dan kotoran
- » Tampung aneka barang di kontainer
- » Simpan barang-barang yang dibutuhkan
- » Atur kembali isi lemari
- » Bersihkan area dengan disinfektan



BEKERJA DARI RUMAH

- » Kenakan pakaian kerja
- » Makan sebelum bekerja
- » Bekerja ditempat khusus
- » Bersikap teratur, tetap profesional & fokus



BERSIHKAN ALAT KOMUNIKASI

- » Terutama ponsel dan tablet
- » Pakai perangkat sanitasi UV/kain microfiber + sabun + air



SENGGANG? SAATNYA HIBURAN

- » Aktivitas menghibur
- » Perasan jadi positif, tidak mudah stres
- » Nonton film, baca buku, melukis, menulis, dan lainnya



TAK LUPA OLAHRAGA

- » Jaga pola hidup sehat
- » Jenis olahraga mudah dilakukan di rumah: (Kardio, Yoga, Zumba Jogging dengan treadmill)



**TEMUAN KPK PETAHANA DI JATIM MAINKAN DANA COVID
DPRD BLITAR RAYA ANGGAP SEBAGAI WARNING**

Blitar - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang petahana di Jawa Timur (Jatim) yang akan maju lagi Pilkada 2020, diduga memainkan dana Covid-19. Ditanggapi oleh DPRD di Blitar Raya (kabupaten dan kota), sebagai warning (peringatan) bagi para incumbent.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito jika temuan KPK terkait adanya dugaan petahana yang maju dalam Pilkada 2020 ini, memainkan dana Covid-19. "Akan menjadi perhatian, atensi sekaligus warning bagi kita semua, agar tidak memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan diluar pencegahan Covid-19," ujar Suwito, Kamis (10/9).

Lebih lanjut dijelaskan Suwito anggaran Covid-19 sejak awal dialokasi untuk 3 bidang yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi. "Berasal dari dana hasil refocusing dan realokasi, sesuai aturan pemerintah pusat dan masuk ke pos Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas politisi PDIP ini. Apalagi pemanfaatannya juga sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang pendataannya mulai dari tingkat desa. "Jadi penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Blitar, sudah sesuai dengan aturan dan data yang ada," terangnya.

Ditegaskannya, penggunaan anggaran juga menyesuaikan dengan kondisi Covid-

19, yang pasang surut dari zona hijau ke kuning. Kemudian zona orange hingga merah, kemudian berubah lagi. "Tapi dasarnya jelas yakni DTKS, jadi ada ukuran penggunaan dana nya," tandasnya.

Oleh karena itu Suwito yakin kalau apa yang disampaikan KPK terkait petahana, bukan di Kabupaten Blitar. Selain itu juga tidak disebutkan daerah mana dalam keterangan KPK, karena ini menyangkut petahana. "Seharusnya lebih detail, karena menyangkut petahana," imbuhnya.

Demikian juga kalangan DPRD Kota Blitar melalui Wakil Ketua, Agus Zunaidi kalau sejak awal adanya anggaran Covid-19, dalam rapat-rapat sudah mengingatkan eksekutif (Pemkot Blitar) agar hati-hati dalam penggunaannya. "Tidak melihat petahana atau tidak, seluruh jajaran pemkot sudah kita wanti-wanti," kata Agus.

Bahkan politisi PPP ini menegaskan OPD jangan main-main dengan anggaran yang kaitannya dengan penanganan kesehatan, serta orang kesusahan tersebut. Adanya temuan KPK mengenai dugaan petahana di Jawa Timur, memainkan dana Covid-19 diakui Agus sebagai peringatan. "Jangan main-main, serta harus digunakan sesuai aturan yang ada," imbuhnya.



Ketua DPRD Kab Blitar, Suwito (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi

Jika melihat anggaran hasil refocusing dan realokasi APBD 2020, untuk Pemkab Blitar sebesar Rp 247 miliar. Dengan luas wilayah 22 kecamatan, serta total kasus Covid-19 suspect 1.458 orang, positif 435 orang dan meninggal 30 orang data, Rabu (9/9).

Sedangkan di Kota Blitar dengan anggaran Rp 285 miliar, untuk luas wilayah 3 kecamatan dengan total kasus Covid-19 suspect 240 orang, positif 136 orang dan meninggal 7 orang, data Kamis (10/9). (ais)

IKUTI PILKADA, PDIP SIAPKAN PENGGANTI ARMUJI DI DPRD JATIM

Jakarta - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan proses pergantian antarwaktu (PAW) Armuji dari anggota DPRD provinsi setempat. Hal ini dilakukan setelah Armuji memutuskan maju kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya 2020.

"Sekarang ini kami siapkan semua. Sehingga saat surat pengunduran diri Armuji selesai maka sudah siap," tutur Sekretaris DPD PDIP Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, Kamis (10/9).

PDIP pada Pemilu 2019 berhasil menempatkan tiga kadernya duduk mewakili dapil 1, yang rinciannya Armuji dengan raihan 136.308 suara, lalu Agatha Retnosari 67.339 suara dan Agustin Poliana 24.358 suara.

Ia menuturkan, lantaran Armuji maju di Pilkada sehingga harus mundur dan sesuai aturan penggantinya adalah suara terbanyak keempat. "Catatan kami, peraih suara terbanyak setelah Agustin Poliana adalah Yordan M Bataragoa," kata Sri



Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno

Untari yang juga Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Jatim tersebut. Di internal partai, Yordan M Bataragoa adalah wakil sekretaris bidang eksternal.

Armuji harus mundur sebagai wakil rakyat karena direkomendasi oleh DPP PDIP untuk mendampingi Eri Cahyadi dalam pemilihan kepala daerah Surabaya 2020. Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 meraih suara tertinggi di daerah pemilihan I (Kota Surabaya).

Bakal pasangan calon Eri-Cahyadi dan Armuji ditunjuk Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri maju kontestasi Pilkada Kota Surabaya pada 9 Desember 2020.

Sementara itu, Armuji beberapa waktu lalu mengaku telah menyerahkan semuanya proses PAW kepada partai dan berharap penggantinya selalu siap menjalankan amanat dari rakyat. (ufi)

SOAL SANKSI GUBERNUR KHOFIFAH BUPATI FAIDA NGEYEL MERASA TAK BERSALAH

Jember- Pasca Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjatuhkan sanksi pada Bupati Jember Faida, dia menanggapi dengan keheranan seolah merasa tidak bersalah. Dalam video yang berjudul reaksi bupati tersebar di laman media sosialnya itu, Bupati Faida juga mengkaitkan persoalan itu dengan situasi politik Pilkada. Di sisi lain DPRD Jember menyatakan persoalan sanksi adalah murni karena kelalaian Bupati Faida terhadap proses pembahasan APBD sesuai aturan yang berlaku.

"Saya memahami, namun ada yang saya herankan, karena rekomendasi dari Mendagri itu, keterlambatan tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi sanksi yang turun hanya untuk bupati tidak digaji. Ya saya paham soal itu, saya kira akan ada hikmah," kata Bupati Faida dikutip Kamis (10/9).

Dia juga bersikukuh kebenaran soal pemaparan ketika fasilitasi di Kemendagri. "Saya sudah sampaikan, begitu banyak pembahasan (RAPBD 2020) di DPRD, ditunda dan ditunda lagi, karena alasan yang dipaksakan. Karena UU sudah mengatur, KUA PPAS dan RAPBD lebih 60 hari, akhirnya menggunakan Perkada," ujarnya.

Di sisi lain kondisi faktual, DPRD Jember menyampaikan permasalahan APBD 2020 belum selesai karena ada reko-mendasi dari Kemendagri yang sama-sekali belum dilaksanakan oleh Bupati Jember yakni penyesuaian tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) dan pe-ngembalian pejabat serta rekomendasi Komisioner ASN.

Argumentasi yang disampaikan Bupati Faida juga bertolak belakang dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312 yakni, ayat 1 ; Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya pada ayat 2 ; DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya, ayat 3 ; Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah

terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akhirnya menjatuhkan sanksi administrasi kepada Bupati Jember Faida. Surat itu berupa Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 700/1713/060/2020 tertanggal 2 September 2020. Penjatuhan sanksi tersebut menimbang beberapa hal antara lain, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami keterlambatan dan sampai saat ini belum ditetapkan adalah disebabkan oleh Bupati Jember dan Kepala Daerah yang terlambat mengajukan proses penyusunan APBD merupakan pelanggaran administratif dan perlu dijatuhi sanksi administratif.

Surat Gubernur Jatim ini dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi bersama pimpinan dewan lainnya di gedung DPRD Jember. "Memutuskan, menetapkan, kesatu, Penjatuhan administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan kepada Bupati Jember Faida," ujar Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi. (mok)

GAJI & TUNJANGAN BUPATI FAIDA

- Gaji pokok dan tunjangan sekitar **Rp 6 juta per bulan**
- Hak keuangan insentif yakni 6 kali gaji yakni sekitar **36 juta per bulan**
- Tunjangan operasional bupati yang mencapai lebih dari **Rp 500 juta setahun**.
- Honor kegiatan pada setiap dinas yakni yang awalnya Rp 1,2 juta per kegiatan, menjadi **Rp 4,5 juta per kegiatan**.
- Sementara dari sumber LHP BPK 2019 yang predikatnya Disclaimer menyebutkan, Bupati menerima pendapatan tiap tahun Rp 931 juta dari Jasa Pungut Pajak, namun ternyata ada kelebihan penerimaan **sekitar Rp 557 juta** yang harus dikembalikan pada kas negara.

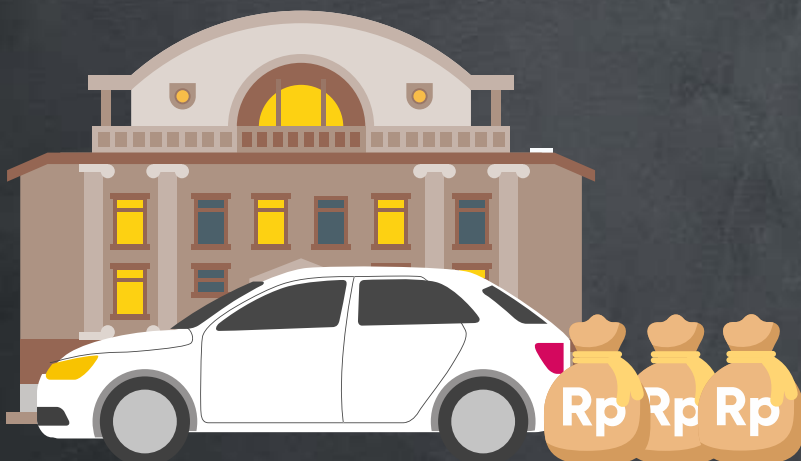


BUPATI JEMBER, FAIDA

"Saya memahami, namun ada yang saya herankan, karena rekomendasi dari Mendagri itu, keterlambatan tanggung jawab bupati dan DPRD. Tapi sanksi yang turun hanya untuk bupati tidak digaji."

JEJAK POLITIK

- Pilkada 2016, Faida mencalonkan diri sebagai Bupati Jember menggandeng KH. A. Muji Arief dan diukung oleh tiga partai, yakni PDI-P, Nasdem, dan PAN.
- Pilkada 2020 : Maju lagi melalui jalur independen bersama calon Wakil Bupati Jember, Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Dia mengklaim mendapat dukungan 246.133 warga.
- Pilkada 2020 : Maju lagi melalui jalur independen bersama calon Wakil Bupati Jember, Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Dia mengklaim mendapat dukungan 246.133 warga.



MENGINTIP KEKAYAAN BUPATI FAIDA

(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara /LHKPN)

TOTAL HARTA KEKAYAAN

- Laporan tahun 2015
Rp 7.965.568.855
- Laporan 31 Desember 2018
Rp 8.583.251.471
- Laporan 31 Desember 2019
Rp 15.751.731.502

MEMILIKI UTANG

- Rp 11.805.577.565

SUMBER KEKAYAAN

- 23 bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Kabupaten Jember senilai sekitar **Rp 11.466.474.000**
- Surat berharga yang nilainya **Rp 10.939.500.000**
- Aset berupa kas dan setara kas senilai **Rp 4.616.305.067**
- Alat transportasi dan mesin senilai **Rp 480.000.000** (Kendaraan termahal Toyota Alphard buatan 2005 dengan taksiran Rp 190.000.000)
- Harta bergerak lainnya : **Rp 55.030.000**



PILKADA DIBAYANGI CORONA

45 WILAYAH PILKADA DI ZONA MERAH, 60 BACALON POSITIF CORONA

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap data terbaru bakal calon kepala daerah yang dinyatakan positif virus Corona (Covid-19). Hingga hari ini, tercatat ada 60 bacalon Pilkada Serentak 2020 yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Tak hanya itu, Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan data kabupaten dan kota di Indonesia yang berada di zona merah penularan virus Corona Covid-19 pada saat pelaksanaan Pilkada 2020. Disebutkan, total ada 45 kabupaten/kota.

"Dari 309 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada, terdapat 45 kabupaten/kota atau 14,56 persen daerah dengan risiko tinggi," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9).

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman, saat rapat bersama Komisi II, di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9) mengatakan, "Data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan sampai hari ini, jumlahnya mencapai, data di situ (slide) masih 46, tapi per hari ini sampai tadi siang sudah 60 calon dinyatakan positif COVID-19."

Arief mengatakan data tersebut didapatkan berdasarkan hasil tes swab yang dilakukan dalam rangka pendaftaran calon kepala daerah. 60 bacalon yang terpapar Covid-19 itu berasal dari 21 provinsi. "Dan tersebar di 21 provinsi, dari laporan yang kami terima dari 32 provinsi," ujarnya.

Tak hanya calon kepala daerah, anggota KPU pusat sendiri juga sudah ada yang terinfeksi. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting, terkonfirmasi positif Covid-19. Arief menegaskan, hasil positif Covid-19 diketahui dari hasil swab test yang dijalani Evi pekan ini. Hasilnya baru keluar Rabu 9 September 2020.

"Hasilnya baru keluar kemarin. Terus positif. Tapi positif tanpa gejala," kata Arief, Kamis (10/9/2020). Dia menuturkan, meski positif Covid-19, Evi tak mengalami gejala atau diklaimnya termasuk orang tanpa gejala (OTG). "Terus kami sudah minta, Bu Evi sudah lakukan isolasi mandiri," jelas Arief.

Selain itu, Evi pun disebutkan masih aktif melakukan kegiatan secara online. "Bu Evi masih aktif, masih sehat, masih mengikuti seluruh kegiatan KPU melalui daring," jelas Arief. (ist)



**Ketua KPU,
Arief Budiman**

45 KAB/KOTA PENYELENGGARAN PILKADA DI ZONA MERAH

SUMATERA UTARA:

1. Mandailing Natal (Pilbupati)
2. Kota Binjai (Pilwalkot)
3. Kota Gunungsitoli (Pilwalkot)
4. Kota Medan (Pilwalkot)
5. Kota Sibolga (Pilwalkot)

SUMATERA BARAT:

6. Kota Padang (Pilgub)
7. Kota Padang Panjang (Pilgub)
8. Agam (Pilgub)
9. Kota Bukittinggi (Pilgub dan Pilwalkot)
10. Kota Padang Panjang

RIAU:

11. Kuantan Singingi (Pilbupati)
12. Pelalawan (Pilbupati)
13. Siak (Pilbupati)
14. Kota Dumai (Pilwalkot)

KEPULAUAN RIAU:

15. Kota Tanjungpinang (Pilgub)
16. Kota Batam (Pilgub dan Pilwalkot)

BANTEN:

17. Kota Tangerang Selatan (Pilwalkot)

JAWA BARAT:

18. Kota Depok (Pilwalkot)

JAWA TENGAH:

19. Kota Semarang (Pilwalkot)

JAWA TIMUR:

20. Banyuwangi (Pilbupati)
21. Sidoarjo (Pilbupati)
22. Kota Pasuruan (Pilwalkot)

BALI:

23. Badung (Pilbupati)
24. Bangli (Pilbupati)
25. Jembrana (Pilbupati)
26. Karangasem (Pilbupati)
27. Tabanan (Pilbupati)
28. Kota Denpasar (Pilwalkot)

SULAWESI SELATAN:

29. Kota Makassar (Pilwalkot)

SULAWESI UTARA:

30. Kota Manado (Pilgub dan Pilwalkot)

KALIMANTAN SELATAN:

31. Barito Kuala (Pilgub)
32. Hulu Sungai Utara (Pilgub)
33. Tanah Laut (Pilgub)
34. Balangan (Pilgub) dan Pilbupati
35. Hulu Sungai Tengah (Pilgub dan Pilbupati)
36. Kotabaru (Pilgub dan Pilbupati)

KALIMANTAN TENGAH:

37. Barito Selatan (Pilgub)
38. Barito Timur (Pilgub)
39. Barito Utara (Pilgub)
40. Kota Palangkaraya (Pilgub)

KALIMANTAN TIMUR:

41. Kutai Kartanegara (Pilbupati)
42. Mahakam Ulu (Pilbupati)
43. Kota Balikpapan (Pilwalkot)
44. Kota Bontang (Pilwalkot)
45. Kota Samarinda (Pilwalkot)

DATA PILKADA 2020

- Jadwal Pencoblosan 9 Desember 2020
- Jumlah Pemilih 106 Juta
- Peserta 9 Provinsi, 37 Kota, 224 Kabupaten

ANGGARAN PILKADA

Awal Rp 99 Triliun melalui APBD270 Daerah

KPU usulkan tambahan Rp 4,7 Triliun melalui APBD

(Tambahan Anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan di masa pandemi)



Petugas Pantarlih dan KPSS gunakan alat pelindung diri

Jumlah pemilih di TPS maksimal 500 orang

Sediakan Hand Sanitizen, Cairan Disinfektan, dan Sabun Cuci Tangan

Pemilih diukur suhu tubuhnya dengan Thermo Gun Scanner

Pemilih dan petugas TPS wajib pakai masker

Pemilih akan menggunakan alat coblos sekali pakai

Pemilih tandai jari dengan tinta semprot



KUNJUNGAN WISATA SEPI, RESOR MEWAH DI INDIA DIJADIKAN KOLAM IKAN

Industri perjalanan dan perhotelan menjadi salah satu sektor yang paling terpuuk selama pandemi Covid-19. Sebuah resort di Kerala, India menggunakan pendekatan kreatif untuk beradaptasi dengan dampak pandemi.

Dilansir dari Arabnews, sebuah resor mewah India Selatan bernama Aveda Resort mengambil tindakan drastis dengan mengubah kolam renang mereka menjadi tempat peternakan ikan, guna menopang bisnis utama mereka yang tutup.

Biasanya, resor mewah tersebut dipenuhi dengan turis dari Eropa dan seluruh dunia. Para turis akan menempati kolam renang untuk sekadar bersantai atau berolahraga. Namun kolam renang setinggi 150 meter itu kini dipenuhi dengan ikan bintik mutiara.

Sebagaimana diketahui, sejak Maret lalu India telah mengeluarkan aturan lockdown secara nasional yang melarang hotel dan resort beroperasi dengan adanya kasus pandemi. Oleh sebab itu, General Manager Aveda Resort Jyotish Surendran mengatakan pihaknya mencoba hal lain.

"Pendapatan kami jadi nol. Akhirnya pada bulan Juni, kami menempatkan sekitar 16.000 ikan bintik mutiara berumur dua bulan di tempat [kolam

renang hotel] itu," katanya seperti dikutip World of Buzz (Selasa (1/9/2020)).

Ikan mutiara adalah bahan populer dalam masakan India Selatan dan Timur Tengah. Ikan ini membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk mencapai ukuran penuh siap proses. Aveda Resort berencana memanen ikan pada November dan mengekspornya ke Timur Tengah.

Mereka menargetkan pendapatan sekitar Rp500 juta dari ekspor tersebut. Pendapatan ini tidak akan cukup untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan dari penutupan akibat pandemi. Ini hanya akan digunakan untuk menutup tagihan dasar guna menjaga bisnis tetap berjalan sembari menunggu operasional kembali dibuka.

Berdasarkan data Worldometer, hingga hari ini India mencatatkan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 3,6 juta kasus infeksi. Tertinggi ketiga di dunia, tepat di bawah Amerika Serikat dan Brasil. Adapun, angka kematiannya mencapai 65.000 kasus dan jumlah pasien sembuh sebanyak 2,8 juta kasus.

Sebelumnya, Pemerintah India telah memutuskan untuk membatalkan hampir seluruh visa yang sudah keluar. Keputusan ini merupakan langkah untuk menahan penyebaran virus corona di negara tersebut.

Menurut data pemerintah, setiap tahun India didatangi 10 juta wisatawan. Dengan adanya kasus virus corona, angka tersebut diprediksi akan sulit tercapai, terlebih dengan pembatalan-pembatalan perjalanan dan penginapan.

CEO Federasi Perhotelan dan Pariwisata Rajasthan, Rachna Singh, mengatakan, sebagian besar dari wisatawan yang telah memesan untuk datang bulan depan telah membatalkan pesannya. Padahal, di Negara Bagian Rajasthan, sebanyak empat dari 10 warganya bergantung pada industri wisata.

Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Operator Tur Domestik India Chetan Gupta, turis dan perjalanan bisnis telah turun tajam tahun ini, tetapi larangan visa akan membuat aktivitas menjadi terendah sepanjang masa. "Semua anggota kami menderita saat ini. Tidak ada yang punya bisnis sama sekali, masuk, keluar, atau domestik," ujarnya.

Direktur hotel bintang lima Crowne Plaza di Kochi, Sooraj Nair, mengatakan, pemesanan telah merosot hingga 20 persen. Larangan visa akan menyebabkan krisis di industri perhotelan akan terjadi jika berlanjut selama beberapa bulan (Ist).



GATAL DAN BENGGAK MUNCUL

AKIBAT

ALERGI BUAH



Foto : Istimewa

Reaksi alergi buah merupakan kondisi di mana tubuh seseorang menganggap zat yang terkandung dalam buah tersebut berbahaya, sehingga menimbulkan reaksi alergi berupa gatal-gatal atau bengkak setelah mengonsumsinya. Zat ini juga biasa disebut sebagai alergen.

Pada orang-orang yang mengalami alergi buah, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya kandungan profilin, sejenis protein nabati yang ada dalam buah. Protein ini berperan dalam pembentukan sel tanaman dan dapat ditemukan pada buah melon, semangka, jeruk, dan pisang.

Reaksi alergi biasanya akan muncul hanya dalam hitungan menit setelah konsumsi buah pemicu. Namun, ada juga beberapa orang yang baru mengalami reaksi setelah satu hingga dua jam.

Perlu diketahui, gejala alergi buah ini umumnya hanya berlangsung beberapa detik atau menit. Ini disebabkan karena protein buah bisa dengan cepat dipecah oleh air liur. Alergi ini biasanya bisa hilang dengan cepat dan tidak memerlukan perawatan serius.

Jika Anda sudah benar-benar mengidap alergi ini, mulailah menghindari makanan atau minuman apapun yang mengandung buah pemicu, tak terkecuali produk-produk

kecantikan yang menggunakan buah tersebut sebagai bahannya seperti lip balm.

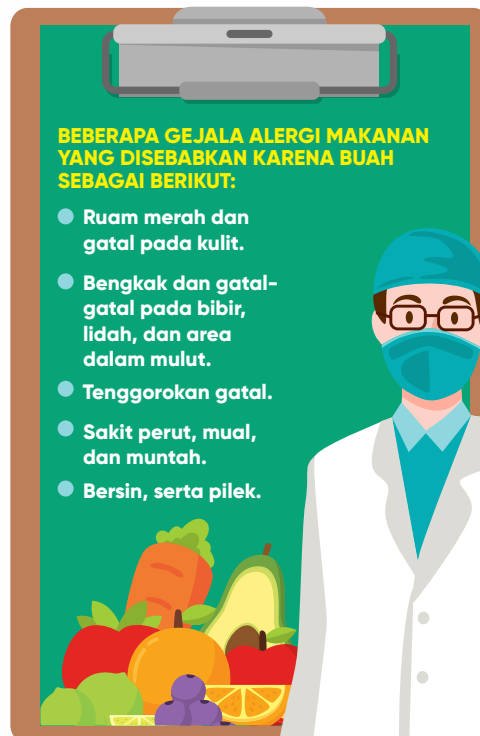
Apabila Anda pergi berbelanja bahan-bahan makanan, ingatlah untuk selalu membaca label komposisi bahan. Pastikan produk yang Anda beli terbebas dari buah yang dapat memicu alergi

Anda.

Dalam beberapa kasus, memasak buah dan sayuran tertentu dapat menghancurkan dan mengubah protein yang menyebabkan sindrom alergi oral. Namun, ini tergantung pada jenis buah apa yang memicu reaksinya.

Umumnya, ada beberapa buah dan sayuran yang punya kondisi sendiri saat dimasak. Kacang-kacangan dan seledri misalnya, mengandung beberapa alergen dan tidak semuanya hancur oleh panas. Pada buah-buahan, alergen dalam stroberi juga tahan terhadap panas.

Bagi Anda yang memiliki reaksi alergi parah, dokter akan memberikan Anda obat berupa auto injeksi epinefrin yang harus berada di dekat Anda dan dibawa setiap bepergian. Jadi, ketika reaksi tersebut terjadi, Anda bisa langsung disuntikkan obat tersebut sebelum pergi ke ruang gawat darurat (Ist).





**MOBIL LAPIS BAJA
'VPK-STRELA'**

MOBIL LAPIS BAJA 'VPK-STRELA' RINGAN DAN UNIK

Industri kendaraan militer Rusia (VPK Military Industrial Company) mengembangkan mobil taktis ringan VPK-Strela yang bisa diangkat menggunakan helikopter untuk pasukan penyerjun payung.

Komandan Angkatan Udara Kolonel Jenderal Andrei Serdyukov mengatakan mobil lapis baja VPK-Strela merupakan kendaraan ringan bersenjata yang unik, karena bisa melaju 155km/jam.

"Pekerjaan sedang dilakukan untuk membuat mobil ringan Strela. Karakteristik mobilitas modelnya unik.

Kecepatan maksimumnya mungkin 155km/jam," kata dia dilansir kantor berita Rusia, TASS (Senin, 7/9/2020).

"Kendaraan tersebut digunakan untuk berbagai misi, termasuk untuk memasang persenjataan," kata dia.

Kehadiran mobil ringan bersenjata itu sudah diprediksi pada 2019, ketika pihak militer mengatakan ada rencana untuk melengkapi unit Angkatan Udara dengan mobil "tipe ringan baru".

Perusahaan Industri Militer Rusia mengatakan kepada TASS, salah satu kelebihan Strela adalah bobotnya yang

ringan sekitar 4,7 ton atau setengah berat ranpur GAZ Tigr.

Dengan demikian untuk memindahkan Strela bisa diangkat helikopter Mi-8 menggunakan tali sling eksternal.

VPK-Strela kebal terhadap serangan balistik level 2 yakni peluru panas senapan serbu AK-74, senapan mesin AKM, serta senapan sniper Dragunov. Mobil juga dapat bertahan dari ledakan ranjau seberat 2kg yang setara dengan TNT.

Strela yang berkapasitas delapan penumpang akan diproduksi sepenuhnya di Rusia dengan tingkat komponennya dalam negeri (TKDN) mencapai 100 persen (Ant).





RAHASIA AWET MUDA PEMAIN DRAKOR 'ALICE' KIM HEE SUN

Kim Hee Sun mulai dikenal sebagai aktris sejak 1990-an. Puluhan drama dan film telah dia bintang. Kini, dia kembali dalam drama terbaru SBS, Alice. Alice yang tayang setiap Jumat dan Sabtu, mulai 28 Agustus 2020 ini merupakan drama aksi sci-fi yang men-

ceritakan perjalanan waktu seorang detektif dan fisikawan jenius.

Berpasangan dengan Joo Won yang jadi detektif Park Jin Gyeom, Kim Hee Sun memerankan dua tokoh sekaligus, sebagai ibu Park Jin Gyeom di masa lalu dan sebagai fisikawan yang cemerlang di usia

muda bernama Yoon Tae Yi.

Selain rating, hal yang menarik lagi adalah tampilan segar Kim Hee Sun sebagai fisikawan muda saat usianya sudah 43 tahun. Berikut rahasia awet muda Kim Hee Sun yang dilansir dari Koreaboo. Yuk kita simak!!!



Jaga Kelembapan

Kunci perawatan kulit aktris kelahiran 1977 ini adalah kelembapan. Apa pun aktivitasnya, dia selalu memastikan kulitnya cukup terhidrasi dengan baik. Secara umum untuk menjaga kelembapan, kita harus cermat memilih pembersih wajah.

Lebih baik memilih pelembap dalam bentuk krim atau salep untuk wajah kering, dibandingkan bentuk lotion. Pilih pelembap yang mengandung minyak alami. Misalnya, pelembap dengan minyak zaitun atau minyak jojoba. Selain itu, bahan lain yang juga dapat membantu kulit kering adalah lactic acid, hyaluronic acid, gliserin, lanolin, minyak mineral dan petrolatum.



Cuci Muka dengan Sparkling Water

Kim Hee Sun selalu mencuci wajahnya dengan sparkling water yang diketahui efektif mengencangkan pori-pori yang kendur dan melebar. Sparkling water merupakan air dengan gelembung udara yang mengandung karbon dioksida alami juga beberapa jenis mineral.

Selain mengencangkan kulit, sparkling water juga baik untuk meredakan bengkak di wajah. Banyak artis wanita lainnya yang telah menunjukkan kecintaan mereka pada air ini. Mereka mengungkapkan bahwa sparkling water benar-benar menghilangkan kotoran, menjaga pori-pori kulit tetap bersih, meredakan pembengkakan wajah Anda, dan bantu buat wajah elastis. (Foto/Naskah:Ist)



Resesi Makin (dari hal 1)

Alarm kasus corona yang sudah menyala merah itu membuat Gubernur Anies secara mendadak menarik rem darurat dengan kebijakan PSBB total yang membuat pasar saham goyang. Hari ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus kembali terbenam di zona merah dengan koreksi 5%. Konsekuensinya adalah trading halt atau perdagangan dihentikan selama setengah jam.

Pelaku pasar merespons negatif kebijakan ini karena dengan mandeknya ekonomi Jakarta akan sangat membebani perekonomian nasional dan bisa dipastikan RI akan mengikuti 44 negara lain yang jatuh ke jurang resesi.

Namun dari segi kesehatan, ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo, menyampaikan bahwa langkah DKI Jakarta harus diikuti wilayah yang berada di zona merah dan oranye. "Merah itu setelah oranye. WHO enggak mengenal kata oranye, adanya merah, kuning, hijau. Jadi oranye sebenarnya merah," kata Windhu.

Untuk diketahui, peta penyebaran virus corona di dunia dibagi menjadi beberapa zona yang dikelompokkan berdasar warna. Zona merah (risiko tinggi), zona kuning (risiko rendah), dan zona hijau (tanpa risiko). Seperti disebut Windhu, di Indonesia ada satu kategori lagi, yakni zona oranye (risiko sedang). Windhu mengatakan, selama masih ada daerah di zona merah dan oranye, artinya di daerah itu tidak boleh ada pergerakan manusia.

"Itu intinya. Penularan (Covid-19) terjadi karena ada pergerakan manusia. Virus (corona) kan dibawa manusia, tidak terbang sendiri," ujar dia. Dia menyampaikan, wilayah Indonesia yang berada di zona merah dan oranye juga harus menerapkan PSBB total, terutama yang ada di pulau Jawa. "Bukan hanya DKI Jakarta yang harus lakukan PSBB total. Tapi zona merah, oranye, atau kuning sekalipun," tegas Windhu.

Dia menyampaikan, banyak wilayah yang berada di zona kuning merasa sudah aman. Padahal, menurut dia, zona kuning juga masih berisiko ada penularan meski rendah. Ada alasan utama yang membuat Pulau Jawa perlu melakukan PSBB total. Menurut Windhu, infrastruktur di Pulau Jawa baik. Artinya, kita dapat terhubung dengan mudah dan tak perlu memakan waktu lama untuk pergi dari satu kota ke provinsi lain.

Senada dengan Windhu, pakar

epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman, pun mengatakan agar pencegahan benar-benar optimal harus dilakukan secara menyeluruh. "PSBB ini sebagai strategi tambahan perlu dilakukan secara komprehensif melibatkan semua sektor masyarakat. Kedua, melibatkan wilayah-wilayah sekitar," kata Dicky.

"Karena kalau bicara Jakarta, mobilitas penduduk yang berasal dari wilayah sekitarnya tinggi. Idealnya sekali kalau mau mencapai hasil yang jauh lebih efektif ya Jabodetabek harus melakukan PSBB secara serentak," imbuhnya.

Dicky juga menyampaikan, pemerintah seharusnya juga sudah mulai memikirkan adanya potensi wilayah Jawa secara keseluruhan harus melakukan PSBB total atau karantina wilayah serempak. "Terutama yang potensi bahaya nih, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tingkat kematiannya tinggi, tapi testing-nya kecil banget," kata Dicky. "Itu artinya, wilayah tersebut lagi menyimpan bom waktu yang siap meledak."

Dicky menyampaikan, ketika angka kematian tinggi dan beban di rumah sakit sudah tidak bisa menampung, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain menerapkan PSBB serentak. "Ini yang harus diantisipasi. Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Jawa Barat sebenarnya harus bersiap-siap," jelasnya.

Berdasarkan hasil analisis zonasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga 6 September 2020, ada 70 wilayah yang berada di zona merah atau wilayah dengan risiko penularan tinggi di Indonesia. Sementara itu, daerah zona oranye meningkat dari 230 menjadi 267 kabupaten/kota bila dibandingkan data 30 Agustus. Sedangkan jumlah daerah

zona kuning berkurang dari 141 menjadi 114 kabupaten/kota.

Ekonomi Langsung Tersungkur

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini IHSG bergerak cukup stabil. Namun kembali anjlok pagi ini lantaran pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan PSBB ketat.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," ujar Airlangga dalam Rakornas Kadin, Kamis (10/9).

Airlangga mengatakan, keputusan Anies untuk melakukan rem mendadak tersebut telah berdampak langsung pada market. Sehingga menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan masyarakat agar ekonomi tetap berjalan.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto. "Pengumuman PSBB oleh DKI Jakarta secara langsung direspons oleh market karena ketidakpastian yang masih belum pasti di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 baik pada sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi," kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, Kamis (10/9).

Sejumlah ekonom meyakini, pada kuartal III-2020, Indonesia sudah pasti akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. "Di kuartal III dengan ada PSBB atau tanpa PSBB, resesi sudah hampir pasti. Karena memang situasinya lumayan sulit di kuartal III-2020, tidak seperti yang sebelumnya," ujar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal, Kamis (10/9). (ist)

Kontribusi PDRB 4 Provinsi Terbesar Terhadap PDB Nasional Kuartal II-2020 (%)

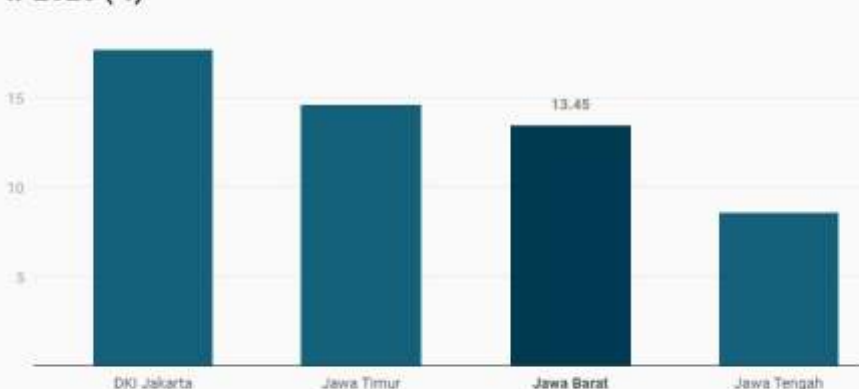


Chart: Tirta Citradil - Source: BPS Jakarta

Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURHj. ANIK MASLAGHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURKUSNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURH. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMURSAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

SEMUA FRAKSI DPRD JATIM SETUJU RAPERDA P-APBD TAHUN ANGGARAN 2020 DISAHKAN MENJADI PERDA

Surabaya - Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim tahun anggaran 2020 akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini setelah mendapat persetujuan dari sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada Rapat Paripurna, Kamis (10/9/2020).

Persetujuan itu disampaikan dalam pandangan akhir fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing, yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Zainie; Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN), Lilik Hendarwati; Fraksi PDIP, Mahfud; Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih; Fraksi Gerindra, Satib; Fraksi Demokrat, Hartoyo; Fraksi Golkar, Muhammad bin Mu'afi Zaini; Fraksi Nasdem, Muzamil Safi'i; dan Fraksi PAN, A Basuki Babussalam.

Meski semua fraksi di DPRD Jatim setuju dengan Raperda P-APBD tersebut, namun tetap disertai beberapa catatan. Diantaranya seperti yang disampaikan juru bicara FPPP, Zainie. Catatan yang disampaikan diantaranya terkait dengan potensi pendapatan daerah dimana seharusnya masih ada potensi peningkatan misalnya pada deviden dari BUMD, pajak kendaraan bermotor, retribusi Rumah Sakit Umum Pemprov Jawa Timur yang mengalami penurunan.

"Hal ini perlu dilakukan inovasi, baik dari sisi pengelolaan manajemen pelayanan atau kelengkapan sarana prasarana yang dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat membayar pajak dan Retribusi," tandasnya Zainie.

Kemudian juru Fraksi Golkar Jatim, H Muhammad Bin Mu'afi Zaini juga menyampaikan beberapa catatan, diantaranya meminta supaya penambahan alokasi anggaran di sejumlah RSUD supaya dapat meningkatkan pelayanan lebih baik dan adil, disertai pertanggungjawaban administrasi yang benar. Kemudian juga terkait realokasi anggaran untuk BPOPP dan ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap hasil kerjanya dalam mendukung program kependidikan dan penanganan pekerja migran. Untuk itu agar pertimbangan kembali sehingga mendukung dampakekonomi masyarakat.

"Perlunya BUMD yang memiliki kemampuan produksi barang tertentu dapat dioptimalkan kerjanya untuk mendukung penanganan Covid-19. Selanjutnya untuk mendukung perekonomian rakyat, perlu perhatian khusus bagi UKM dalam hal bantuan modal, dana

bergulir serta promosi hasil produknya," tandasnya.

Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim yang dibacakan Lilik Hendarwati juga menyampaikan beberapa catatan, diantaranya refocusing anggaran supaya benar-benar dibelajakan sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk penanganan dan pencegahan pandemic Covid-19.

"Kebijakan politik anggaran defisit tidak bermasalah jika memang benar-benar digunakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 yang lebih terukur dan produktif dengan indikator yang jelas, yakni secara bertahap angka statistik Covid-19 terus melandai dan tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik dan meningkat," tegas ketua FKBN DPRD Jatim ini.

Kemudian juga mendorong agar realisasi belanja tak terduga khususnya untuk penanganan dan pencegahan serta dampak pandemi Covid-19 yang mengalami kenaikan sebesar Rp.1.211.708.956.335 segera direalisasikan secara optimal, termasuk bantuan untuk sektor pertanian di pedesaan.

Sementara itu, Fraksi Nasdem, melalui Muzamil Safi'i mengharapkan supaya pandemic Covid-19 bisa lekas selesai. Kemudian juga terjadi pemulihan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jatim bisa kembali pada kisaran angka 5% seperti saat sebelum adanya pandemic.

Kemudian dari Fraksi PAN yang dibacakan A Basuki Babussalam mengingatkan bahwa saat ini ada sebuah sinyal dari DKI Jakarta yang mengisyaratkan akan memberlakukan lagi PSBB secara masif dan luar biasa. Pemberlakuan tersebut tentunya akan membawa dampak pada daerah lain termasuk Jatim. "Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional mohon pada Pemprov Jatim untuk memaksimalkan segala ikhtiar yang memungkinkan dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat Jawa Timur," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan usai penandatanganan persetujuan Perda P-APBD Jatim 2020 menyatakan banyak terima kasih atas kerjasama fraksi-fraksi, komisi-komisi dan Banggar DPRD Jatim terhadap pembahasan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020.



Dia menandakan bahwa Perubahan APBD Jatim 2020 dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp 33.028.697.094.110 berubah menjadi Rp 29.970.461.500.763 atau berkurang Rp 3.058.235.593.343.

Sedangkan Belanja Daerah yang semula dianggarkan Rp 35.196.693.483.734 berubah menjadi Rp 34.785.907.490.645,39 atau berkurang sekitar Rp 410.701.993.088,61. Kemudian defisit yang semula sebesar Rp 2.167.912.389.624 berubah menjadi Rp 4.815.445.989.822,39 atau bertambah sebesar Rp 2.672.533.600.285,39.

Pembiayaan daerah, sisi penerimaan yang semula sebesar Rp 2.203.865.389.624 berubah menjadi Rp 4.876.398.998.882,39 atau bertambah sebesar Rp 2.672.533.600.258,39. Kemudian dari sisi pengeluaran yang semula sebesar Rp 35.953.000.000 berubah menjadi Rp 60.953.000.000 atau bertambah sekitar Rp 25.000.000.000 sehingga pembiayaan netto yang semula sebesar Rp 2.167.912.389.624 berubah menjadi Rp 4.815.445.989.882,39 atau bertambah sebesar Rp 2.647.533.600.258,39.

"Silpa tahun berkenaan atau Silpa semula nol rupiah tetap tidak ada perubahan," tegas Gubernur perempuan pertama di Jatim.

Dengan disetujuinya perda perubahan APBD Jatim tahun anggaran 2020, Gubernur menyampaikan terimakasih atas kerjasama seluruh jajaran pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan seluruh anggota DPRD Jatim. "Sehingga dalam membangun amanah tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Jatim akan dilakukan dengan tetap bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi untuk mencari titik terbaik bagi pelayanan masyarakat Jatim," pungkasnya. (ufi/adv)